



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Ameks, 20 April 2017

Kasus Transit Passo Tertutup

Ambon - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diingatkan untuk tidak bermain mata dalam melaksanakan penegakan hukum atas kasus dugaan korupsi dana pembangunan Proyek Terminal Transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang dibangun sejak 2007.

Pasalnya, kasus tersebut secara diam-diam telah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan untuk proses penyidikannya diketahui telah berjalan. Sejumlah pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan proyek tersebut oleh Kejati Maluku sebagian besar telah dimintai keterangan. Namun, Kejati Maluku tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada publik terkait penanganannya.

Padahal kasus tersebut telah diketahui luas oleh kalangan masyarakat setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Namun kini perkembangan kasusnya terkesan tertutup. Sumber koran dilingkup Kejati Maluku, Rabu (19/4) kemarin menyebutkan, kalau kasus yang telah menghabiskan keuangan negara sebesar Rp 38 miliar itu dalam tahap penyelidikan dan pihak terkait sebagian besar sudah dimintai keterangan ditahap penyelidikan. Termasuk diantaranya mantan Kadis Perhubungan Kota Ambon, Angganoto Ura. "Dalam kasus tersebut sudah ada pemanggilan pihak terkait untuk dimintai keterangan ditahap penyelidikan. Salah satu yang diketahui sudah dimintai keterangan adalah mantan Kadisub Kota Ambon, Angganoto Ura," kata sumber.

Menanggapi hal tersebut, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Ssapulette membantah kalau sudah dilakukan permintaan keterangan ditahap penyelidikan. Pasalnya, progres permintaan keterangan belum juga dilakukan tim penyidik. "Bagaimana mana mau dimintai keterangan, sedangkan progres permintaan keterangan belum juga dilakukan. Itu tidak benar. Yang jelas saat ini memang kasusnya sudah dalam tahap penyelidikan dan silakan di pantau saja oleh rekan-rekan," tandas Samy.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Menurutnya, suatu perbuatan tindak pidana korupsi tentunya sangat berkaitan dengan masyarakat. Karena, yang diduga dikorupsi adalah uang negara sehingga visi kejaksaan untuk menegakan hukum ditengah masyarakat haruslah lebih profesional dan bukan hanya janji tapi bukti.

Menyikapi hal tersebut, praktisi hukum, Pileo Fiosten Noiija kepada Ambon Ekspres dengan tegas meminta kepada pihak Kejati Maluku untuk tidak bermain-main dalam menuntaskan kasus tersebut. Karena, masyarakat sementara menunggu kejelasan hukum oleh pihak kejaksaan terhadap penganan kasus itu. “Saya pikir kasus tersebut sudah diketahui luas oleh masyarakat. Secarah otomatis masyarakat sendiri akan mengawal dan menunggu proses kejaksaan dalam melakukan penuntasan atas kasus tersebut. Dengan demikian, jaksa harus profesional dan transparan dalam menangani kasus tersebut,” tegas Noiija.

Dia juga berharap, dalam penanganannya kejaksaan lebih terbuka kepada publik untuk memberikan informasi. Karena, dengan keterbukaan itu akan menunjukkan bahwa Kejati Maluku serius dalam menuntaskan kasus tersebut. “Keterbukaan informasi itu lebih penting sehingga masyarakat tidak berkesimpulan apabila kasus tersebut dihentikan karena diduga Jaksa masuk angin atau jaksa main mata dengan pihak terkait untuk menghentikan kasus tersebut dengan berbagai alasan,” ujar Noiija.

Sekedar ingat, terminal transit tersebut mulai dibangun pada masa pemerintahan Jopi Papilaja sebagai Walikota Ambon bersama wakilnya Olivia Latuconsina. Ini sebagai bagian dari upaya menjadikan Desa Passo sebagai kota orde kedua. Pemerintah bersemangat dengan menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah pada beberapa tahun anggaran. Namun hingga kini terminal tersebut tak kunjung selesai pembangunannya. **(MG1)**

<http://ambonekspres.fajar.co.id/2017/04/20/kasus-transit-passo-tertutup/4/>



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres